



PEMAKZULAN IMRAN KHAN SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN DOMINASI DINASTI BHUTTO DAN SHARIF DI PAKISTAN TAHUN 2022

^{1*}Naufal Arief Pratama, ²Evida Kartini

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Indonesia

*Surel: naufal.arief11@ui.ac.id

Tanggal pengiriman: 16 Mei 2025 | Tanggal direvisi: 10 Oktober 2025 | Tanggal diterima: 13 Oktober 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze how the impeachment of Imran Khan in 2022 was part of an effort to maintain the political dominance of the Bhutto and Sharif dynasties in Pakistan. Imran Khan's victory in the 2018 general election marked a shift in Pakistan's political power, which had long been dominated by the Bhutto and Sharif families through the Pakistan People's Party (PPP) and the Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N). Khan's success in challenging the dominance of these two dynasties was perceived as a threat to their political existence and long-standing popularity. This research employs a qualitative method with secondary data analysis, including a literature review from various relevant sources, which is then examined through the lens of cartel party theory and the concept of inter-party cooperation. The findings indicate that Imran Khan's impeachment was an effort by the Bhutto and Sharif dynasties in Pakistan. Both dynasties played a significant role, from the formation of the coalition and consolidation of power to exerting political and legal pressure on Khan. These efforts were aimed at eliminating Khan from the political stage in Pakistan and ensuring he would not pose a threat in the future.

Keywords: Imran Khan, Political Dynasty, Party Cartelization, Pakistan People's Party, Pakistan Muslim League-Nawaz

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemakzulan Imran Khan pada tahun 2022 merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan dominasi dinasti politik Bhutto dan Sharif di Pakistan. Kemenangan Imran Khan dalam pemilihan umum 2018 menandai pergeseran kekuatan politik di Pakistan yang selama ini didominasi oleh keluarga Bhutto dan Sharif melalui *Pakistan People's Party* (PPP) dan *Pakistan Muslim League Nawaz* (PML-N). Keberhasilan Khan dalam menggeser dominasi kedua dinasti tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi politik dan popularitas mereka yang selama ini telah lama mendominasi politik di sana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder mencakup studi kepustakaan dari berbagai sumber relevan yang kemudian dikaitkan dengan teori partai kartel dan konsep *inter-party cooperation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakzulan Imran Khan merupakan upaya dari dinasti Bhutto dan Sharif di Pakistan yang membentuk partai kartel untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Keduanya memiliki andil besar, mulai dari pembentukan koalisi, penghimpunan kekuatan, termasuk pemberian tekanan politik dan hukum terhadap Khan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menutup panggung politik Khan di Pakistan serta memastikan dirinya tidak menjadi ancaman di masa depan.

Kata Kunci: Imran Khan, Dinasti Politik, Kartelisasi Partai, Pakistan People's Party, Pakistan Muslim League-Nawaz

LATAR BELAKANG

Selama beberapa dekade, konstelasi politik di Pakistan telah menunjukkan pola dinamika kekuasaan berulang yang didominasi oleh sekelompok elite melalui sistem politik dinasti. Hal tersebut menunjukkan kesamaan ciri dan karakteristik dengan negara-negara Asia Selatan pada umumnya, di mana ikatan-ikatan kekerabatan seperti kasta, klan, etnisitas, dan identitas memainkan peranan yang cukup signifikan dalam kontestasi politik elektoral (Mufti, 2008). Adanya ikatan ini memungkinkan sebuah kelompok elite untuk menguasai dan melegitimasi cengkeraman keluarga politik mereka serta mewariskannya kepada generasi baru di dalam anggota keluarga. Dengan demikian, sirkulasi elite yang terjadi di Pakistan sering kali bersifat sempit dan hanya terbatas pada keluarga-keluarga tertentu (Lyon, 2019).

Dalam salah satu literturnya, Kristof (2008) menjelaskan bahwa adanya monopoli politik seperti ini, akan memungkinkan suatu kelompok elite untuk menguasai sumber daya sehingga sering kali menyulitkan aktor-aktor baru untuk masuk ke dalam kontestasi politik elektoral. Selama ini, konstelasi politik di Pakistan memang didominasi oleh dua kekuatan dinasti utama yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan politik di sana. Dinasti tersebut meliputi keluarga Bhutto bersama *Pakistan People's Party* (PPP) dan keluarga Sharif bersama *Pakistan Muslim League-Nawaz* (PML-N). Keduanya telah memainkan peran yang cukup krusial di pemerintahan dengan mendominasi politik Pakistan secara berseberangan dan silih berganti, baik sebagai pemerintah maupun oposisi selama puluhan tahun (Begum, 2025).

Dominasi dinasti Bhutto dapat ditelusuri sejak periode kolonial, ketika ayah dari Zulfikar Ali Bhutto, Sir Shah Nawaz Bhutto menjadi bagian dari elite feodal di Sindh yang memiliki hubungan kedekatan dengan kolonial Inggris (Bennet, 2020). Ia mendapatkan gelar kehormatan *knighthood* pada tahun 1930 sebagai pengakuan loyalitasnya kepada pemerintahan Inggris. Kedekatannya dengan pemerintah Inggris

telah memberikannya akses ke kekuasaan dan sumber daya, yang kemudian dimanfaatkannya untuk memperkuat posisi keluarga Bhutto di wilayah Sindh. Hal tersebut juga berperan sebagai fondasi kuat bagi keluarga Bhutto untuk membangun dan memperkuat jaringan kekuasaannya. Dominasi keluarga Bhutto pun kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Zulfikar Ali Bhutto.

Pada awalnya, karier politik Zulfikar dimulai dengan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Pakistan di bawah kepemimpinan Ayub Khan. Namun, ketegangannya dengan Ayub Khan membuatnya keluar dari pemerintahan dan mendirikan partai baru yang bernama PPP. Dengan modal sosial yang kuat di Sindh, Zulfikar bersama PPP berhasil meraih dukungan publik yang kuat serta membangun citranya sebagai pemimpin rakyat yang melawan otoritarianisme militer (Raza, 1997). Zulfikar berhasil mengambil alih kepemimpinan Pakistan pasca terjadinya krisis politik yang melemahkan legitimasi rezim militer Yahya Khan karena pemerintahannya dianggap gagal dalam menyelesaikan krisis antara Pakistan Barat dan Timur. Namun, sikap dan keberaniannya dalam melawan otoritarianisme militer membuat dirinya harus tewas dijatuhi hukuman mati dalam kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq pada tahun 1997. Meskipun itu, Zulfikar justru berhasil memperkuat warisan dan legitimasi keluarga Bhutto karena banyak masyarakat yang menganggap ia berperan besar sebagai martir demokrasi dalam melawan rezim militer yang otoriter dan represif (Raza, 1997).

Perjuangan keluarga Bhutto pun dilanjutkan oleh putrinya, Benazir Bhutto dengan memimpin PPP yang merupakan warisan dari ayahnya. Sejak awal pengangkatannya, Benazir Bhutto mendapatkan simpati rakyat serta dipandang sebagai masa depan pemimpin perempuan di Pakistan. Hal tersebut pada akhirnya mendorong dirinya berhasil diangkat sebagai perdana menteri pasca kematian Zia-ul-Haq. Dalam masa kepemimpinannya, Benazir terkenal sebagai pemimpin progresif yang membela rakyat kecil dan menentang pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh

militer. Namun, sikap dan keberanian tersebut menyebabkan dirinya harus tewas terbunuh pada tahun 2007. Pasca kematian Benazir, kepemimpinan PPP bergeser kepada suaminya, Asif Ali Zardari, dan anaknya, Bilawal Bhutto Zardari (Haider & Ali, 2018).

Berbeda dari keluarga Bhutto yang berakar dari elite feodal di Sindh, keluarga Sharif berasal dari kelas pedagang dan industrialis di wilayah urban Punjab. Mereka memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan membangun jaringan ekonomi kuat pada sektor baja dan konstruksi (Shoukat & Gomez, 2020). Dinasti Sharif tidak terlepas dari peran dan kiprah politik Nawaz Sharif yang beberapa kali menjadi aktor politik utama di Pakistan. Karier politik Nawaz dimulai ketika dirinya diangkat menjadi Menteri Keuangan Punjab di bawah pemerintahan militer Zia-ul-Haq (Syed, 1998). Pasca kematian Zia-ul-Haq, Nawaz semakin berupaya memantapkan posisi dan pengaruhnya sebagai pemimpin sipil yang dapat mengisi kekosongan kekuasaan. Salah satunya dengan membentuk PML-N, yaitu sebuah partai faksi besar hasil perpecahan dari *Pakistan Muslim League* (Shafqat, 2020).

Dengan basis dukungan yang besar, Nawaz berhasil memperkuat pengaruh dan popularitas keluarga Sharif serta mendominasi pemilihan umum (pemilu) di Pakistan. Pada masa kepemimpinannya, Nawaz juga memastikan pengaruh politiknya tetap bertahan dengan mengangkat beberapa anggota keluarganya, misalnya adiknya, Shehbaz Sharif, dan putrinya, Maryam Nawaz, dalam pemerintahan (Ullah, 2020). Di bawah kepemimpinan dua kekuatan utama dinasti politik tersebut, Pakistan mengalami berbagai tantangan besar, seperti skandal kasus korupsi, lemahnya institusi hukum, serta ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi. Selain itu, kedua dinasti ini juga mendominasi politik elektoral di Pakistan sehingga menyebabkan kekuasaan sering kali terkonsentrasi pada kedua keluarga tersebut melalui sistem politik dinasti di dalam pemerintahan (Begum, 2025).

Meskipun konstelasi politik di Pakistan telah lama didominasi oleh persaingan antara dua kekuatan utama dinasti politik di sana, secara dramatis, pada pemilihan umum tahun 2018. Imran Khan yang merupakan mantan pemain kriket internasional berhasil menggeser dominasi keluarga Bhutto dan Sharif setelah partainya, *Pakistan Tehreek-e-Insaf* (PTI), memenangkan jumlah kursi mayoritas di parlemen. Kemenangan Khan tidak terlepas dari pendekatan dan retorika populisnya yang berhasil memperoleh simpati dari masyarakat Pakistan (Faiz, 2022). Dalam hal ini, Khan muncul sebagai simbol perubahan bagi banyak rakyat Pakistan yang selama ini kecewa dengan kepemimpinan dinasti Bhutto maupun Sharif. Namun, keberhasilan Khan dalam menggeser dominasi dinasti Bhutto dan Sharif ini nyatanya dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi dan popularitas kedua dinasti yang selama ini telah mendominasi politik di Pakistan. Hal ini semakin diperkuat setelah dua kekuatan utama dinasti tersebut memutuskan untuk berkolusi dengan membentuk sebuah koalisi oposisi yang bernama *Pakistan Democratic Movement* (PDM) pada tahun 2020. Secara garis besar koalisi ini berhasil menyatukan dua kekuatan utama dinasti di Pakistan yang kerap berseberangan, serta partai-partai oposisi di luar pemerintahan Khan. Puncaknya, koalisi ini berhasil menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap Imran Khan pada tahun 2022 yang membuat dirinya harus dimakzulkan dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Pada dasarnya, fenomena pemakzulan Khan melalui mosi tidak percaya yang dilakukan oleh PDM ini cukup menarik untuk dikaji. Pasalnya, dua kekuatan utama dinasti politik di Pakistan yang kerap berseberangan dan memiliki perbedaan ideologi, dapat bersatu membentuk suatu front oposisi untuk menentang pemerintahan Khan. Melalui PDM, keduanya saling bekerja sama dalam menyingkirkan kemunculan kekuatan baru, Imran Khan, yang dianggap mengancam eksistensi dan popularitas mereka. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan penelitian, “Bagaimana pemakzulan Imran

Khan pada tahun 2022 merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan dominasi dinasti Bhutto dan Sharif di Pakistan?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemakzulan Imran Khan pada tahun 2022 merefleksikan upaya dari dinasti Bhutto dan Sharif dalam mempertahankan dominasi pengaruh mereka yang selama ini ada dalam struktur kekuasaan di Pakistan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam memahami fenomena pemakzulan Imran Khan, kita perlu memahami terlebih dahulu konteks dan dinamika politik Pakistan yang menyebabkan dinasti politik seperti Bhutto dan Sharif dapat mendominasi politik di sana. Melalui studinya, Mohiuddin memberikan studi komprehensif mengenai sejarah, politik, ekonomi, dan budaya Pakistan. Pasca merdeka pada tahun 1947, Pakistan mengalami ketidakstabilan sosial politik, termasuk integrasi etnis dan geografis yang cukup rumit, terutama pasca absennya kepemimpinan kuat setelah Muhammad Ali Jinnah wafat (Mohiuddin, 2006). Pakistan terus berupaya dalam membentuk institusi dan sistem politik yang stabil dan sesuai. Namun, kegagalan yang konsisten dari para politisi sipil dan birokrat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif ini sering kali mendorong terjadinya krisis yang berujung kudeta militer di Pakistan.

Pada awal kemerdekaan Pakistan, militer memang menjadi salah satu aktor kunci yang menentukan arah politik di Pakistan. Hal ini tercermin melalui berbagai kudeta militer dan pemerintahan langsung seperti di bawah rezim Ayub Khan, Yahya Khan, dan Zia-ul-Haq. Namun, seiring menguatnya demokratisasi dan elite sipil di Pakistan, keterlibatan militer dalam politik perlahan mulai bertransformasi dari yang sebelumnya membentuk pemerintahan langsung menjadi intervensi halus, misalnya dengan mengisi posisi-posisi strategis maupun membangun konsensus antara sipil-militer (Rizvi, 1998). Oleh karena itu, dalam era kontemporer saat ini, militer jarang terlibat dalam konflik dengan sipil dan pengambilalihan kekuasaan secara langsung.

Mereka cenderung memilih untuk memainkan peranan dominan di balik layar guna memastikan bahwa kepentingan kelembagaannya terlindungi, terutama dalam isu-isu strategis. Tatanan politik di Pakistan yang terjadi saat ini juga merupakan hasil dari dinamika hubungan sipil-militer yang menciptakan kompromi dan negosiasi kekuasaan. Hal tersebut yang menyebabkan institusi sipil maupun sistem politik Pakistan cenderung tidak stabil dan sulit berkembang, termasuk dengan sistem demokrasi yang berupaya dibangun sejak awal kemerdekaan (Nasr, 2004). Akibat hal tersebut, demokrasi di Pakistan berjalan secara semu, sehingga marak praktik-praktik politik informal dan kontrol kekuasaan yang tetap berada di tangan sekelompok elite.

Konstelasi politik seperti ini tentu memudahkan sistem patronase dan jaringan klientelisme, termasuk dinasti politik tumbuh subur dan mendominasi politik di sana. Hal ini tercermin melalui tatanan politik di Pakistan yang selama ini didominasi oleh dua kekuatan dinasti utama, yaitu Bhutto dan Sharif. Dominasi keduanya terbentuk dari hasil warisan masing-masing elite penguasa sebelumnya yang memiliki pengaruh dan status dalam politik di Pakistan. Hal tersebut kemudian diturunkan secara askriptif dengan menonjolkan status nama besar mereka sebagai upaya mempertahankan elitisme dan patronase yang selama ini mereka bangun (Lyon, 2019). Melalui salah satu studinya, Lodhi (1978) menganalisis bahwa dinasti politik di Pakistan telah membawa dampak paling destruktif terhadap sistem demokrasi dan stabilitas ekonomi karena kepemimpinan para elite dinasti yang tidak kompeten. Hal ini tercermin melalui kondisi Pakistan yang mengalami kemerosotan ekonomi, korupsi, masalah kesehatan masyarakat, kebijakan luar negeri yang rumit, dan lain sebagainya ketika keluarga Bhutto ataupun Sharif berkuasa. Keduanya terbelenggu oleh romantisme para pendahulu mereka dan gagal menghilangkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat (Abbas, 2020).

Kondisi tersebut juga menciptakan kontestasi politik elektoral di Pakistan sarat akan kepentingan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Dalam salah satu

studinya, Kamran (2009) mengungkapkan bahwa sejak awal diselenggarakan, pemilihan umum di Pakistan penuh dengan gejolak dan dinamika. Sentralisasi ekstrem dan peran dominan sangat yang dimainkan eksekutif sangat terlihat, terutama di provinsi seperti Punjab dan Sindh. Banyak oposisi—dalam hal ini pihak yang berupaya menentang *status quo* dinasti politik di sana—mendapatkan intimidasi dan para anggotanya menjadi sasaran berbagai tindakan represif (Kamran, 2009). Selain itu, melalui tulisannya, Ibrahim dan Mussarat (2015) mengungkapkan bahwa fenomena tersebut juga tidak terlepas dari lemahnya proses pembangunan konstitusional dan institusional yang terjadi di Pakistan. Hal ini tentu berimplikasi pada sirkulasi elite dan kekuasaan yang cenderung terpusat pada pihak atau keluarga tertentu, serta menghambat kekuatan baru untuk muncul dan berkontestasi dalam politik di Pakistan (Ibrahim & Mussarat, 2015).

Partai Kartel

Dalam membantu menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan teori partai kartel oleh Katz dan Mair (1995). Dalam tulisannya, Katz dan Mair menyoroti transformasi yang terjadi dalam model partai politik di negara-negara demokrasi Barat menuju partai kartel. Katz dan Mair memulai analisisnya dengan mengkritik model partai massa yang banyak dianggap oleh berbagai literatur klasik sebagai satu-satunya model partai ideal karena memiliki akar kuat di masyarakat sipil serta basis keanggotaan yang luas. Bahkan, apabila suatu partai mengalami perubahan terhadap model ini, maka partai tersebut dianggap sebagai contoh partai yang mengalami kemunduran atau kegagalan. Namun, menurut Katz dan Mair, perubahan model dalam partai politik merupakan hasil dari proses adaptasi terhadap kondisi sosial politik serta evolusi politik yang berkelanjutan. Selain itu, perkembangan partai dianggap sebagai proses dialektis yang mendorong kemunculan berbagai model baru, termasuk salah satunya adalah partai kartel.

Dalam literatur tersebut, Katz dan Mair menyebutkan bahwa kemunculan partai kartel tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan struktural dalam hubungan antara partai politik, masyarakat sipil, dan negara pada akhir abad ke-20. Pada masa itu, keterkaitan partai dan masyarakat sipil melemah sehingga ketergantungan partai terhadap negara semakin meningkat. Selain itu, muncul dorongan untuk memperoleh insentif sehingga tujuan politik sebuah partai bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan memperoleh kekuasaan demi menjaga kelangsungan partai tersebut. Katz dan Mair mendefinisikan partai kartel sebagai model ketika partai-partai mulai berkolusi untuk menjadi agen negara guna memastikan kelangsungan hidup kolektif mereka. Menurut Katz dan Mair (1995, p. 17), "*Hence we see the emergence of a new type of party, the characterized by the interpenetration of party and state, and also by a pattern of inter-party collusion.*" Dengan demikian, alih-alih menjadi representasi kelompok masyarakat sipil yang bersaing dalam memperebutkan kekuasaan negara, partai-partai kini cenderung membentuk kolusi sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi kolektif mereka. Melalui literatur tersebut, Katz dan Mair menunjukkan bahwa partai kartel merupakan bentuk evolusi lanjut dari partai politik yang didasarkan pada hubungan terhadap masyarakat sipil (*mass party*) ataupun ideologi (*catch-all party*). Dalam hal ini, partai kartel lebih memiliki kecenderungan untuk berkolaborasi dan membentuk semacam "kartel politik" sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan serta mengamankan akses terhadap sumber daya negara.

Ada beberapa karakteristik dan ciri khas dari partai kartel yang membedakannya dengan model partai lainnya. *Pertama*, gaya representasi partai yang menjadi perpanjangan tangan dari negara (*agent of state*). Dalam hal ini, partai menjadi bagian agen negara, mengelola negara atas nama efisiensi dan stabilitas, bukan berdasarkan mandat dari kelompok sosial yang diwakilinya. *Kedua*, tujuan utama partai kartel adalah menjadikan politik sebagai profesi (*politics as profession*). Orientasi

partai politik mulai bergeser menuju profesi atau pekerjaan sehingga posisi mereka (dalam kekuasaan) dianggap harus dipertahankan. *Ketiga*, partai menjadi bagian negara (*party becomes part of the state*). Dengan menjadi bagian dari negara, partai berpotensi mendapatkan insentif berupa sumber daya (*resources*) serta memungkinkan mereka memanfaatkan berbagai instrumen sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan.

Keberadaan partai kartel sering kali berimplikasi juga terhadap dinamika konstelasi politik dan demokratisasi di sebuah negara. Menurut Katz dan Mair (1995), *“Democracy becomes a means of achieving social stability rather than social change, and elections become ‘dignified’ parts of the constitution.”* Dalam hal ini, partai kartel lebih memandang demokratisasi sebagai sarana untuk mencapai stabilitas sosial dibandingkan perubahan sosial, sementara pemilu merupakan “ritual” legitimasi para elite untuk mempertahankan eksistensi kolektif mereka. Kondisi politik seperti ini memungkinkan partai-partai yang tergabung dalam kartel memastikan kekuasaan tetap berada di tangan mereka dengan membentuk kolusi antara elite-elite politik, termasuk menyingkirkan kekuatan baru yang berpotensi mengancam eksistensi kekuasaan mereka.

Inter-Party Cooperation (Non-Rule-Based Coalition)

Selain menggunakan teori partai kartel, penulis juga memasukkan konsep *inter-party cooperation (non-rule-based coalition)* sebagai kerangka untuk melihat bentuk kerja sama yang dihasilkan antara dinasti Bhutto dan Sharif melalui PDM. Dalam tulisan yang berjudul *“Forms of Inter-party Cooperation: Electoral Coalitions and Party Mergers”* (2018), Ibenskas dan Bolleyer mengklasifikasikan bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan antara partai politik. Menurut Ibenskas dan Bolleyer, bentuk kerja sama antara partai politik dapat dilihat melalui dua dimensi utama, yaitu struktur kerja sama dan cakupan kerja sama. Dalam hal ini, struktur kerja sama merujuk pada

apakah kerja sama tersebut berdasarkan pada aturan yang mengikat (*rule-based*) atau tidak berdasarkan aturan (*non-rule-based*). Sementara itu, cakupan kerja sama mengacu pada apakah kerja sama terbatas pada fungsi tertentu saja (*functionally restricted*) atau mencakup seluruh aspek kehidupan partai (*organization-wide*). Berdasarkan dua dimensi tersebut, terdapat empat bentuk kerja sama antara partai politik menurut Ibenskas dan Bolleyer, yaitu: (1) *non-rule-based coalition*, (2) *rule-based coalition*, (3) *non-rule-based merger*, (4) *rule-based merger*. Pada tulisan ini, penulis hanya berfokus pada salah satu bentuk kerja sama, yaitu *non-rule-based coalition* sebagai kerangka dasar untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat penulis.

Dalam bentuk *non-rule-based coalition*, kerja sama antara partai tidak dibangun atas aturan bersama yang formal. Selain itu, kerja sama yang terbentuk bersifat sementara atau *ad hoc* serta fungsinya terbatas pada kepentingan tertentu saja—umumnya yang bersifat elektoral atau kepentingan mendesak. Ada beberapa karakteristik atau ciri khas dari bentuk kerja sama *non-rule based*. *Pertama*, kerja sama tidak diatur oleh struktur atau aturan formal yang mengikat. Oleh karena itu, sifatnya lebih fleksibel, dinamis, dan cepat sebagai langkah untuk merespons situasi mendesak. *Kedua*, koalisi atau kerja sama yang terbentuk bersifat sementara. Hal ini sering kali menyebabkan koalisi yang terbentuk tidak bersifat jangka panjang dan dapat berubah, terutama ketika tujuan utama telah tercapai. *Ketiga*, kerja sama yang disepakati oleh koalisi terbatas pada aspek tertentu saja, sementara masing-masing partai tetap mempertahankan struktur dan identitas organisasional masing-masing. Dengan demikian, bentuk kerja sama ini tidak memerlukan kesamaan ideologi mendalam, tetapi kesamaan kepentingan jangka pendek. *Keempat*, sifatnya yang lebih informal atau pragmatis. Hal ini berimplikasi pada kesepakatan yang dapat berubah sewaktu-waktu serta adanya tarik-menarik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian dengan metode kualitatif berupaya mengeksplorasi makna yang berasal dari permasalahan sosial secara mendalam. Metode ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali secara komprehensif proses politik dan dinamika aktor-aktor yang terlibat dalam pemakzulan Imran Khan. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder, yang mencakup teks dari berbagai sumber kredibel dan relevan dengan studi kasus. Dalam melakukan studi literatur, penulis berfokus pada penelitian yang berkaitan dengan dinamika elite dan dinasti politik di Pakistan yang didominasi oleh keluarga Bhutto dan Sharif. Selain itu, penulis juga meninjau konteks pemakzulan Imran Khan, mulai dari proses pembentukan koalisi oposisi hingga tekanan institusional yang diberikan terhadap Khan.

DISKUSI

Dualisme Dinasti Bhutto dan Sharif dalam Politik Tradisional Pakistan

Konstelasi politik di Pakistan telah lama diwarnai oleh praktik-praktik informal dan demokratisasi yang berjalan secara semu. Lieven menyebutkan, meskipun Pakistan memiliki institusi demokrasi serta menerapkan pemilu secara rutin, pada dasarnya kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite politik yang beroperasi dalam jaringan patronase dan kekerabatan. Selain itu, sistem politik yang berjalan di Pakistan lebih membentuk struktur oligarki dinasti dibandingkan demokrasi partisipatif karena sebagian besar kekuasaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi politik cenderung terbatas dalam lingkup keluarga elite (Lieven, 2011). Hal ini menyebabkan kebijakan yang ada sering kali tidak didasarkan pada kepentingan publik, tetapi orientasi personal elite untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan kekuasaan (Kitschelt, 2000). Dengan lanskap politik seperti ini, maka mudah untuk keluarga elite, seperti dinasti Bhutto dan Sharif, untuk muncul

dan mendominasi kekuatan politik di Pakistan. Keduanya telah lama muncul dan secara bergantian mendominasi politik di Pakistan selama beberapa dekade. Mereka terus berupaya memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga mereka dengan mengandalkan dukungan dari partai politik dan jaringan kekerabatan yang mereka bangun di dalam pemerintahan.

Bersama PPP, Bhutto berhasil membangun narasi politik berbasis sosialisme demokratis dengan fokus pada kepentingan kelas pekerja serta retorika menentang pemerintahan otoriter (Badejo, 1988). Berkat narasi tersebut, Bhutto akhirnya memperoleh kepercayaan untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca kekalahan dalam Perang India-Pakistan tahun 1971 yang menyebabkan krisis politik dan runtuhnya rezim militer Yahya Khan. Pasca kematian Zulfikar Ali Bhutto, kepemimpinan PPP bertransisi secara askriptif kepada putrinya, Benazir Bhutto, yang sekaligus menjadi ikon perempuan dalam pemerintahan Pakistan. Dalam kepemimpinannya, Benazir Bhutto memainkan peran sentral dengan mengkonsolidasikan PPP sebagai partai yang didominasi keluarganya. Hal ini tercermin ketika Benazir mengangkat suaminya, Asif Ali Zardari, untuk terlibat dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Selain itu, dirinya juga mempersiapkan putranya, yaitu Bilawal Bhutto, untuk masuk ke dalam politik (Bennet, 2020).

Selama memimpin PPP, Benazir terkenal sebagai pemimpin progresif yang membela rakyat kecil dengan retorika menentang pemerintahan otoriter, terutama yang dipimpin oleh militer. Namun, sikap dan keberanian tersebut juga yang pada akhirnya menyebabkan dirinya harus tewas dalam kasus pembunuhan pada tahun 2007 (Muñoz, 2013). Kematian Benazir Bhutto tidak serta merta menghentikan langkah PPP dalam memperkuat pengaruh dan dominasi politik mereka di Pakistan. Pasca kematiannya, kepemimpinan PPP dilanjutkan oleh suami dan putranya, yang berhasil mempertahankan pengaruh keluarga Bhutto di Pakistan (Bennet, 2020).

Berbeda dari keluarga Bhutto, PML-N berhasil mendapatkan legitimasi masyarakat dari kuatnya pengaruh mereka dalam sektor bisnis dan industrialisasi. Hal ini karena Muhammad Sharif, ayah Nawaz Sharif, merupakan industrialis sukses pada tahun 1950 dan 1960-an sekaligus salah satu pendiri Ittefaq Group, produsen baja terpadu Pakistan yang berpusat di Lahore (Bray, 1991). Pengaruh keluarga Sharif dalam politik Pakistan semakin diperkuat ketika Nawaz berhasil menempati posisi tinggi di Punjab berkat dukungannya untuk rezim militer Zia-ul-Haq. Hal ini kemudian dimanfaatkannya dengan memasukkan adik-adiknya, yaitu Shahbaz Sharif dan Abbas Sharif, ke dalam posisi-posisi strategis (Begum, 2025). Selain mengangkat keluarganya, Nawaz juga memanfaatkan ikatan pernikahan untuk mengkonsolidasikan kontrol sumber daya serta mengurangi adanya potensi gangguan dari pihak luar yang mengancam dominasi keluarganya.

Hal ini tercermin ketika kedua putrinya menikah dengan pasangan yang memiliki koneksi strategis. Putri sulung Nawaz, Maryam Sharif menikah dengan Kapten Safdar, seorang pensiunan perwira militer sekaligus politisi terpilih. Sementara itu, putri bungsunya, Asma Sharif menikah dengan putra Ishaq Dar, seorang politisi Pakistan terkemuka yang menjabat sebagai menteri federal di pemerintahan Nawaz Sharif (Lyon, 2019). Jaringan pernikahan ini semakin memperkuat posisi dinasti Sharif dalam politik. Layaknya dinasti politik yang terjadi di beberapa negara lainnya, pemerintahan Pakistan di bawah kepemimpinan dinasti Bhutto dan Sharif penuh dengan praktik-praktik informal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme meskipun Pakistan memiliki institusi atau lembaga demokrasi dan hukum (Qadeer et al., 2021).

Keluarga Bhutto maupun Sharif berada dalam kubu yang saling bertolak belakang. Hal ini karena keluarga Bhutto dan PPP lebih mengedepankan ideologi progresif khas kiri dengan berfokus pada prinsip-prinsip sosialis, keadilan sosial, dan retorika pro-rakyat yang menarik masyarakat kecil, seperti kelompok buruh dan

petani. Sebaliknya, keluarga Sharif bersama PML-N cenderung memiliki ideologi yang lebih konservatif dengan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi liberal, pro-bisnis dan privatisasi, dan fokusnya dalam mempererat hubungan dengan kelompok bisnis (Khan & Verma, 2024). Perbedaan ini sering kali menciptakan benturan kepentingan dalam kebijakan sosial ekonomi serta memicu konflik dan ketegangan antara kedua keluarga tersebut.

Konflik antara dinasti Bhutto dan Sharif tercermin dalam berbagai upaya penyingkiran yang dilakukan satu sama lain melalui tekanan politik dan hukum. Hal ini dapat tercermin salah satunya ketika Benazir Bhutto dijatuhkan dakwaan hukum atas kasus korupsi dan pencucian uang. Sementara itu, keluarga Bhutto dan PPP juga beberapa kali memberikan tekanan terhadap pemerintahan keluarga Sharif yang dianggap korupsi dan gagal dalam menjalankan pemerintahan (Abbas, 2024). Secara umum, dominasi dan rivalitas antara keluarga Bhutto dan Sharif ini telah menciptakan siklus atau pola politik berulang, di mana kedua belah pihak secara bergantian berusaha untuk menyingkirkan lawan politiknya sebagai upaya mempertahankan pengaruh dan dominasi kekuasaan keluarga masing-masing.

Kemenangan Imran Khan melalui Pendekatan Populis sebagai Alternatif

Pada pemilu Pakistan tahun 2018, secara mengejutkan, Imran Khan bersama PTI berhasil memenangkan pemilihan umum sekaligus mengubah lanskap politik Pakistan yang selama ini didominasi oleh keluarga Bhutto ataupun Sharif. Berbanding terbalik dengan keluarga Bhutto dan Sharif, Khan berasal dari keluarga kelas menengah atas, di mana ayahnya hanyalah seorang insinyur sipil biasa yang tidak memiliki pengaruh dan dominasi dalam politik di Pakistan (Dmitrieva, 2021). Dalam mengawali karier politiknya, Imran Khan mendirikan PTI bersama beberapa rekannya, yaitu Naeemul Haque, Ahsan Rasheed, Hafeez Khan, Mowahid Hussain, Mahmood Awan, dan Nausherwan Burki pada tahun 1996 dengan tujuan

memperjuangkan hak dan membantu masyarakat kurang mampu (Corsi, 2019). Selama ini, Imran Khan bersama PTI membangun citra sebagai politisi bersih, independen, serta anti dengan politik dinasti. Dengan pendekatan dan retorika anti pemerintahannya, Khan perlahan berhasil memperoleh simpati masyarakat yang menginginkan perubahan dari sistem politik yang selama ini didominasi oleh dua keluarga besar tersebut. Hal tersebut juga yang membuat Khan dan PTI berhasil memenangkan pemilu 2018, di mana Khan membawakan slogan *Naya Pakistan* (Pakistan Baru). Slogan ini merupakan visi pemerintahan Khan untuk mereformasi sistem politik dan ekonomi Pakistan dengan membersihkan praktik-praktik korupsi dan kolusi, membentuk kebijakan berdasarkan keadilan sosial, serta lebih mandiri secara ekonomi dan diplomatik (Sheikh, 2018).

Tabel 1.
Total Perolehan Kursi PTI, PML-N, dan PPP Periode 2013 dan 2018

No	Tahun Pemilu	PTI	PML-N	PPP
1	2013	35	166	42
2	2018	149	82	54

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data dari Shah dan Sareen (2018)

Pada pemilu 2018, PTI berhasil memenangkan pemilihan dengan mendapatkan suara mayoritas di Provinsi Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, dan beberapa wilayah di Karachi. PTI berhasil memperoleh 149 kursi di Majelis Nasional (lihat Tabel 1). Namun, jumlah kursi tersebut belum cukup untuk membentuk pemerintahan mandiri yang membutuhkan suara mayoritas dari total 342 jumlah kursi di Majelis Nasional. Oleh karena itu, PTI membentuk koalisi dengan beberapa anggota independen dan partai-partai kecil lain, seperti *Balochistan Awami Party* (BAP), *Muttahida Qaumi Movement* (MQM), dan *Pakistan Muslim League-Q* (PML-Q). Dengan adanya koalisi tersebut, PTI berhasil mengamankan total 179 kursi di Majelis Nasional, sehingga memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahan mandiri (Corsi, 2018).

Tabel 2.
Total Perolehan Suara PTI, PML-N, dan PPP Periode 2013 dan 2018

No	Tahun Pemilu	PTI	PML-N	PPP
1	2013	7,6 juta	14,8 juta	6,91 juta
2	2018	16,8 juta	12,89 juta	6,9 juta

Sumber: Shah dan Sareen (2018)

Hal tersebut sekaligus mengantarkan Imran Khan ke puncak kekuasaan sebagai Perdana Menteri Pakistan, menggeser Shahid Khaqan Abbasi sekaligus dominasi PML-N pada pemilu sebelumnya. Lonjakan jumlah perolehan suara PTI pada pemilu tersebut meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan dengan PML-N dan PPP. Diketahui, pada pemilu 2013, PTI hanya memperoleh 7,6 juta total suara. Namun, perolehan suara PTI berhasil meningkat hingga lebih dari dua kali lipat pada pemilu 2018 dengan mencatatkan 16,8 juta suara (lihat Tabel 2). Hal tersebut terjadi juga pada jumlah perolehan kursi PTI antara pemilu 2013 dan 2018. Dalam hal ini, jumlah kursi PTI mengalami peningkatan signifikan dari 35 kursi di tahun 2013 menjadi 149 kursi pada tahun 2022 (lihat Tabel 1). Kedua hal tersebut membuat PTI berhasil menjadi partai terbesar di Pakistan saat itu, serta berhasil mengalahkan dominasi PML-N ataupun PPP.

Kemenangan Imran Khan dan PTI ini tentu membawa harapan baru bagi masyarakat Pakistan. Transisi rezim ini dianggap sebagai langkah awal dalam menciptakan stabilitas politik dan reformasi ekonomi di Pakistan yang selama ini terkonsentrasi melalui sistem politik dinasti. Khan berhasil mengamplifikasi keresahan dan kejenuhan masyarakat yang selama ini tersimpan dengan menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pilihan alternatif dari kalangan non-dinasti (Faiz, 2022). Pasca keterpilihannya, Khan juga menerapkan berbagai kebijakan populisnya untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintahannya. Misalnya, program *Ehsaas*, yaitu sebuah inisiatif membangun jaring pengaman sosial untuk masyarakat Pakistan dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat

misikin, meningkatkan akses pendidikan, serta menyediakan layanan yang lebih terjangkau (Nishtar & Khan, 2023). Melalui hal tersebut, Khan dan PTI berhasil memosisikan diri mereka sebagai representasi masyarakat yang menantang pengaruh dan dominasi politik dinasti Bhutto dan Sharif. Situasi ini tentu memberikan sinyal ancaman bagi keluarga Bhutto dan Sharif dalam mempertahankan eksistensi dan popularitas yang selama ini mereka bangun. Hal ini mendorong keduanya bergabung dalam PDM, yaitu gerakan koalisi oposisi yang memiliki peran dan kontribusi besar dalam pemakzulan Imran Khan.

Bersatunya Keluarga Bhutto dan Sharif melalui PDM

Kemenangan Imran Khan memicu respons dari dinasti Bhutto dan Sharif sebagai dua dinasti yang telah lama mendominasi politik di Pakistan. Hal ini kemudian diwujudkan melalui kerja sama antara keduanya dengan membentuk PDM, yaitu koalisi partai-partai oposisi di luar pemerintahan yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Khan bersama PTI. Koalisi ini terbentuk pada tahun 2020 melalui salah satu forum di Islamabad yang mempertemukan partai-partai oposisi utama di Pakistan (Syed & Rahman, 2024).

Hal yang membedakan PDM dari koalisi politik lainnya adalah orientasinya yang bersifat taktis dan sempit, yaitu untuk menggulingkan kekuasaan Khan. Selain itu, koalisi ini diinisiasi langsung oleh para elite politik yang berada di luar pemerintahan Khan sehingga sifatnya lebih elitis (Bukhari et al., 2024). Meskipun masing-masing partai dalam koalisi ini mengirimkan pemimpin atau figur sebagai representasi mereka, pembentukan koalisi ini diprakarsai oleh dua aktor kunci utama, yaitu Nawaz Sharif yang merepresentasikan PML-N serta Bilawal Bhutto Zardari yang merepresentasikan PPP. Keduanya memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menginisiasi pertemuan serta merumuskan tujuan dan narasi PDM (Bukhari et al., 2024).

Dalam upayanya menyingkirkan pemerintahan Khan, koalisi ini melancarkan gelombang protes nasional yang diselenggarakan di berbagai wilayah di Pakistan. Gelombang protes tersebut turut dihadiri oleh tokoh-tokoh pemimpin oposisi seperti misalnya Maulana Fazlur Rehman sebagai Ketua PDM, Maryam Sharif sebagai Wakil Presiden PML-N, dan Bilawal Bhutto Zardari sebagai Ketua PPP. Hal tersebut merupakan upaya dari para pemimpin oposisi untuk menghimpun dukungan publik dengan memanfaatkan basis dukungan massa yang mereka miliki (Khan, 2020).

Pada masa kepemimpinan Khan, Pakistan menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam aspek ekonomi, Pakistan menghadapi tingginya nilai inflasi, merosotnya nilai tukar rupee, dan meningkatnya utang luar negeri. Sementara itu, dalam aspek politik, pemerintahan Khan menghadapi tekanan politik yang cukup kuat dari pihak oposisi yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik di sana (Ali, 2022). Kedua hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai celah oleh PDM untuk mengeskalisasi isu ini melalui berbagai media sebagai upaya menghidupkan sentimen publik untuk melegitimasi tuntutan pemakzulan terhadap Imran Khan (Ghauri et al., 2023).

Selain itu, PML-N dan PPP juga memanfaatkan jaringan ulama dan organisasi keagamaan untuk memperkuat mobilisasi. Berkat dukungan *Jamiat Ulema-e-Islam Fazl* (JUI-F) melalui Maulana Fazlur Rehman, PDM menggunakan platform agama dan nasionalisme sebagai upaya memperkuat persepsi bahwa kepemimpinan Khan tidak hanya gagal, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tradisi politik Pakistan (Zafar et al., 2023). Melalui berbagai pendekatan tersebut, koalisi ini pun berhasil memperoleh banyak dukungan publik serta menarik perhatian berbagai media sehingga gerakan ini mengalami eskalasi dan cukup mengguncang pemerintahan Khan.

Selain menghimpun kekuatan dan dukungan di luar parlemen, PDM juga secara aktif bergerak dalam parlemen dengan menghimpun kekuatan partai-partai

oposisi lain. Sejak awal pembentukannya di tahun 2020, mereka secara aktif menghimpun partai-partai lain bergabung ke dalam PDM untuk menyingkirkan pemerintahan Khan. Mereka berhasil meyakinkan partai-partai lain berkat kompromi politik, salah satunya mengenai posisi strategis dalam pemerintahan pasca pemakzulan Khan. Hal ini di antaranya terlihat ketika PDM, yang diwakili oleh PPP dan PML-N, melakukan lobi dengan *Muttahida Qaumi Movement – Pakistan* (MQM-P), sebuah partai yang memiliki basis politik kuat di wilayah urban Sindh, terutama Karachi dan Hyderabad.

Sebelumnya, MQM-P merupakan partai yang menjadi bagian dalam pemerintahan PTI dan Imran Khan. Namun, menjelang pemungutan suara, MQM-P secara mengejutkan menarik dukungan sekaligus memberikan pernyataan untuk aliansi dengan oposisi (The Times of India, 2022). Keputusan ini tidak terlepas dari negosiasi dan kesepakatan tertulis yang dihasilkan antara MQM-P dan koalisi oposisi. Beberapa hasil kesepakatan tersebut, di antaranya MQM-P akan dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan utama di Sindh serta diberikan kewenangan untuk menunjuk badan-badan lokal, perwakilan, dan kantor-kantor administratif di daerah perkotaan (Geo News, 2022).

Selain partai politik, PDM juga berhasil memanfaatkan keretakan hubungan antara anggota-anggota PTI yang mulai tidak puas dengan kepemimpinan dan kebijakan Imran Khan. Hal ini menyebabkan beberapa anggota PTI membelot dan menarik dukungannya menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya. Hal ini tercermin dari pernyataan Raja Riaz, salah satu petinggi PTI dalam wawancaranya terhadap salah satu media lokal Pakistan. Dalam wawancara tersebut, Riaz menyatakan bahwa ia dan beberapa anggota PTI lainnya memiliki perbedaan pandangan dan orientasi dengan pemimpin mereka, Imran Khan, sehingga mereka akan memilih sesuai hati nurani masing-masing. Selain itu, dirinya juga mengklaim bahwa sampai saat ini terdapat 20 anggota PTI yang akan melakukan pembelotan (Al

Jazeera, 2022). Pergerakan PDM dalam parlemen Pakistan ini nantinya akan berdampak signifikan pada hasil pemungutan suara mosi tidak percaya terhadap Imran Khan. Selain itu, hal tersebut juga membuat legitimasi dan dukungan terhadap pemerintahan Khan dan PTI menjadi semakin rentan (Shahzad, 2022).

Setelah berhasil menghimpun kekuatan serta menciptakan kondisi yang menurut oposisi cukup ideal, pada 8 Maret 2022 partai-partai oposisi, melalui PDM, secara resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap Imran Khan (The Economic Times, 2022). Mosi ini telah didukung dan ditandatangani oleh beberapa partai, di antaranya PPP, PML-N, JUI-F, MQM, BAP, serta beberapa partai kecil lainnya seperti *Balochistan National Party Mengal* (BNP-M), *National Party* (NP), dan *Pashtoonkhwa Milli Awami Party* (PkMAP). Dalam merespons hal ini, Imran Khan menentang adanya mosi ini dan menganggap bahwa hal tersebut dilakukan secara tidak konstitusional serta sarat akan adanya kepentingan atau intervensi asing (Cheema, 2022).

Meskipun itu, Mahkamah Agung Pakistan tetap memerintahkan agar proses pemungutan mosi tidak percaya tetap dilakukan. Pada akhirnya, tanggal 10 April 2022, proses pemungutan suara pun dilaksanakan. Hasilnya, sebanyak 174 dari total 342 anggota parlemen mendukung adanya mosi tersebut, sementara sebagian besar anggota parlemen dari PTI yang sebelumnya membelot tidak hadir dalam pemungutan suara tersebut (The Economic Times, 2022). Imran Khan yang telah kehilangan suara mayoritas akibat pembelotan yang dilakukan oleh anggota-anggota PTI pun berhasil dimakzulkan. Hal tersebut membuat Khan secara resmi dicopot sebagai Perdana Menteri Pakistan sekaligus menjadikannya sebagai perdana menteri pertama dalam sejarah Pakistan yang digulingkan melalui mosi tidak percaya (Raza & Wasim, 2022).

Pemakzulan Imran Khan sebagai Upaya Mempertahankan Dominasi Dinasti Bhutto dan Sharif

Pada dasarnya, fenomena pemakzulan Imran Khan tidak terlepas dari peran dan kerja sama antara dinasti Bhutto dan Sharif, yang diimplementasikan melalui pembentukan PDM sebagai koalisi oposisi untuk menyingkirkan Khan. Sejak awal pembentukannya, keduanya sama-sama berkontribusi dalam penjatuhan mosi tidak percaya, mulai dari tahap pembentukan koalisi, penghimpunan dukungan dan kekuatan, hingga pemberian tekanan politik dan hukum terhadap Imran Khan. Oleh karena itu, fenomena pemakzulan Imran Khan melalui mosi tidak percaya ini bukan hanya mencerminkan dinamika parlementer biasa, melainkan juga upaya dari dinasti Bhutto dan Sharif untuk mempertahankan dominasi kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, Khan muncul sebagai kekuatan politik baru yang dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap dominasi elite politik lama. Hal ini kemudian direspons oleh dinasti Bhutto dan Sharif dengan membentuk kolusi bersama elite-elite partai lainnya, yang kemudian membentuk semacam “kartel politik” melalui PDM sebagai upaya menyingkirkan kekuatan baru yang berpotensi menyingkirkan eksistensi kolektif mereka.

Langkah ini mencerminkan ciri khas partai kartel sebagaimana yang terdapat dalam Katz dan Mair (1995), di mana partai-partai memiliki kecenderungan untuk berkolusi guna mempertahankan eksistensi kolektif mereka dalam arena kekuasaan. PDM, yang diprakarsai oleh dinasti Bhutto dan Sharif sebagai representasi dua kekuatan utama dinasti politik di Pakistan, berhasil menjadi perpanjangan tangan dari negara (*agent of state*) untuk mengembalikan stabilitas sosial politik yang selama ini terguncang dalam pemerintahan Khan. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh elite-elite dalam PDM, khususnya Bhutto dan Sharif, merupakan upaya untuk mengembalikan “profesi politik” mereka yang selama ini telah dibangun. Dengan memperoleh kekuasaan, baik Bhutto maupun Sharif juga akan memungkinkan

mereka memperoleh insentif berupa sumber daya dan berbagai instrumen negara sebagai modal untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan mereka.

Di sisi lain, PDM juga dapat ditinjau melalui kerangka *non-rule-based coalition* sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibenskas dan Bolleyer (2018). Dalam hal ini, PDM bukanlah koalisi yang dibangun di atas aturan bersama yang formal, melainkan koalisi taktis dan strategis untuk menyelesaikan di Pakistan. Oleh karena itu, kerja sama yang terbentuk bersifat sementara atau *ad hoc* serta fungsinya terbatas pada kepentingan jangka pendek, yaitu untuk menyingkirkan Imran Khan dari kekuasaan. Dalam bergerak, PDM juga bersifat lebih informal dan pragmatis di mana koordinasi dan keputusan politik hanya sebatas kebutuhan taktis untuk mencapai tujuan bersama. Pasca Imran Khan dimakzulkan, PDM mulai kehilangan kohesi karena prioritas dan strategi masing-masing partai berubah. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik internal yang berujung pada pembubaran. Secara keseluruhan, melalui dua kerangka tersebut, dapat dipahami bahwa pemakzulan Imran Khan merupakan hasil manifestasi dari kerja sama yang dilakukan antara elite-elite untuk mempertahankan dominasi mereka dalam struktur negara.

Melalui kedua kerangka tersebut, kita dapat melihat upaya dinasti Bhutto dan Sharif dalam merebut kembali kekuasaan melalui kolusi atau kerja sama. Dalam hal ini, PML-N dan PPP yang sebelumnya saling berseberangan secara historis maupun ideologis, justru membentuk koalisi bersama untuk menggulingkan Imran Khan dan PTI yang dianggap sebagai ancaman terhadap *status quo* oligarkis mereka. Koalisi ini bersifat *non-rule based*, karena tidak dibentuk berdasarkan norma kelembagaan atau agenda pemerintahan yang koheren, tetapi atas dasar kepentingan pragmatis jangka pendek, yakni mengakhiri kekuasaan Khan. Meskipun pemakzulan Khan melalui mosi tidak percaya dilakukan secara prosedural, proses politik di balikinya mencerminkan praktik partai kartel yang menyusun aliansi di luar aturan formal demi mengembalikan kontrol atas negara. Dengan demikian, PDM merupakan manifestasi

dari strategi kolektif aktor-aktor politik lama untuk mempertahankan dominasi mereka melalui koalisi sementara yang mengesampingkan perbedaan ideologi dan melanggar batas-batas koalisi normatif yang seharusnya.

Indikasi pemakzulan Imran Khan sebagai upaya dinasti Bhutto dan Sharif dalam mempertahankan dominasi kekuasaan mereka semakin tercermin ketika masing-masing memberikan berbagai tekanan hukum dan politik pasca keruntuhan pemerintahan Khan. Menjelang pemilu Pakistan 2024, Khan dan istrinya, Bushra Bibi, dituduh telah menerima hadiah negara (*toshakhana*) yang berharga selama masa jabatannya dan menjualnya secara ilegal tanpa melaporkannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Akibatnya, Komisi Pemilihan Pakistan (ECP) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Khan melalui PTI telah menerima dana terlarang dari negara dan perusahaan asing. Hal ini menyebabkan pengadilan mengeluarkan putusan penangkapan terhadap Khan sekaligus mendiskualifikasinya mengikuti pemilu berikutnya dengan larangan berpolitik selama lima tahun (Radford, 2023).

Selain itu, pada pemilu Pakistan tahun 2024, PTI menghadapi berbagai kendala politik signifikan, salah satunya mengenai pelarangan penggunaan simbol resmi mereka, yaitu tongkat kriket. Hal ini menyebabkan ECP mengeluarkan putusan yang melarang PTI untuk mengusung kandidat menggunakan simbol partai mereka. Akibatnya, banyak anggota partai terpaksa maju sebagai calon independen, meskipun sebenarnya mereka berasal dari PTI (Ahmad, 2024).

Selain itu, beberapa pendukung kandidat yang terafiliasi dengan PTI juga ditangkap dan diculik oleh badan-badan penegak hukum. Hal ini tercermin ketika PTI mengklaim bahwa beberapa pengusul dan pendukung kandidat mereka di Lahore ditangkap oleh badan-badan penegak hukum. PTI menyoroti bahwa bahkan badan-badan penegak hukum tersebut tidak menghimbaukan jaminan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Lahore (The Express Tribune, 2023). Dugaan kecurangan pada pemilu 2024 tidak berhenti sampai di sana, pada proses perhitungan suara terjadi

penundaan signifikan dalam pengumuman hasil serta dugaan manipulasi hasil suara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam proses perhitungan suara, PTI berhasil bersaing, bahkan sempat unggul mengalahkan PPP dan PML-N (Aamir, 2024). Namun, hasil resmi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Pakistan justru menunjukkan pergeseran mendalam yang tidak konsisten dengan data awal.

Meskipun terdapat serangkaian kontroversi pada pemilu tahun 2024, pada akhirnya PML-N sebagai partai dari elite lama berhasil memenangkan pemilihan umum tersebut. Hal ini sekaligus mengantarkan Shehbaz Sharif dan PML-N kembali ke tampuk kekuasaan (BBC, 2024). Sementara itu, PPP berhasil mendapatkan posisi strategis dalam kabinet dan kementerian utama. Setelah kontroversi pemilu tahun 2024 dan pengangkatan Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri, Pakistan mengalami serangkaian peristiwa yang mengarah pada ketidakstabilan politik dan ketegangan sosial. Berbagai demonstrasi dan gerakan protes mulai bermunculan di berbagai wilayah di Pakistan untuk menuntut transparansi dan keadilan. Ketegangan ini juga mempengaruhi hubungan antara partai politik serta meningkatkan polarisasi, dengan oposisi yang terus-menerus menuntut reformasi dan keadilan. Di sisi lain, Imran Khan dan PTI berhasil mempertahankan pengaruh dan popularitasnya sebagai kekuatan alternatif dari kalangan non-dinasti, bahkan simpati dan dukungan dari masyarakat untuk menentang legitimasi pemerintahan Shehbaz Sharif semakin meningkat secara signifikan (Ellis-Petersen & Baloch, 2024).

Pada dasarnya, berbagai fenomena tersebut semakin menguatkan indikasi bahwa pemakzulan Imran Khan merupakan upaya dari dinasti Bhutto dan Sharif untuk mempertahankan dominasi kekuasaan mereka. Melalui kerangka partai kartel dan *non-rule-based coalition*, kita dapat melihat bahwa keduanya membentuk PDM sebagai upaya untuk menyingkirkan kekuatan Imran Khan yang dianggap mengancam dominasi kekuasaan dinasti Bhutto dan Sharif. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan serta memastikan kendali politik di Pakistan tetap berada dalam

dinasti Bhutto dan Sharif serta membatasi persaingan politik, dengan menutup panggung politik Imran Khan agar dirinya tidak menjadi ancaman di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai literatur dan temuan di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakzulan Imran Khan melalui mosi tidak percaya pada parlemen Pakistan tahun 2022 merupakan bagian dari upaya dan strategi politik sistematis untuk mempertahankan dominasi dinasti politik Bhutto dan Sharif di Pakistan. Dengan menggunakan kerangka partai kartel dan *non-ruled based coalition*, kita dapat melihat adanya kolusi antara dinasti Bhutto dan Sharif yang diimplementasikan melalui pembentukan koalisi oposisi PDM untuk menyingkirkan pemerintahan Khan. Kedua dinasti sama-sama berperan penting dan memiliki andil besar dalam koalisi tersebut, mulai dari pembentukan koalisi, penghimpunan dukungan dan kekuatan, hingga pemberian tekanan politik dan hukum terhadap pemerintahan Khan. Indikasi ini semakin kuat pasca keruntuhan pemerintahan Khan, ketika keduanya bekerja sama dalam memberikan berbagai tekanan institusional secara sistematis untuk menutup panggung politik Khan serta memastikan dirinya tidak menjadi ancaman di masa depan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh peran aktor-aktor non-partai, seperti media, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil dalam kasus pemakzulan Imran Khan. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat kontribusi signifikan dari aktor-aktor itu dalam fenomena tersebut.

BIBLIOGRAFI

Aamir, A. (2024, February 9). *Pakistan election results show unexpectedly tight race*. Nikkei Asia. <https://asia.nikkei.com/Politics/Pakistan-election/Pakistan-election-results-show-tight-race-with-a-long-way-to-go>

-
- Abbas, A. (2024, August 24). *PML-N and PPP: A marriage of inconvenience*. Geo News. <https://www.geo.tv/latest/560817-pml-n-and-ppp-a-marriage-of-inconvenience>
- Abbas, M. (2020, August 18). *PML-N-PPP history of distrust*. The News. <https://www.thenews.com.pk/print/702228-pml-n-ppp-history-of-distrust>
- Ahmad, Z. (2024, January 14). *PTI candidates to contest polls independently*. Business Recorder. <https://www.brecorder.com/news/40283613>
- Al Jazeera. (2022, March 18). *Several Pakistan MPs defect from PM's party before no-trust vote*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/18/pakistan-mps-defect-pm-imran-khan-pti-party-no-confidence-vote>
- Ali, J. (2022). Legitimacy Crises in Pakistan; A Study of Imran Khan Regime. *Zakariya Journal of Social Science*, 1(2), 27-37. <https://doi.org/10.59075/zjss.v1i2.106>
- Badejo, B. A. (1988). Bhutto and the PPP's Socialism. *India Quarterly*, 44(3-4), 240-252. <https://doi.org/10.1177/097492848804400304>
- BBC. (2024, March 3). *Shehbaz Sharif wins second term as prime minister*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-68462846>
- Begum, S. (2025). The Role of Political Dynasties in Pakistani Democracy: A Comparative Study of Bhutto, and Sharif, Families. *Social Science Review Archives*, 3(2), 1510-1519. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.771>
- Bray, J. (1991). Nawaz Sharif's new order in Pakistan. *The Round Table*, 80(318), 179-190.
- Bukhari, S. A. A., Saleem, N., & Ahmad, W. (2024). Pakistan Democratic Movement (PDM) Government through the Lens of Print Media: Exploring The Predominant Narratives. *Global Social Sciences Review*, IX(I), 10-21. [https://doi.org/10.31703/gssr.2024\(IX-I\).02](https://doi.org/10.31703/gssr.2024(IX-I).02)
- Cheema, S. A. (2022, April 16). *Regime Change "or" Change of Regime*. Pakistan Today. <https://www.pakistantoday.com.pk/2022/04/16/regime-change-or-change-of-regime/>
- Corsi, M. (2018). Pakistan 2018: General elections and the government of Imran Khan. *Asia Maior*, 29. <https://www.asiamaior.org/?p=913>
- Corsi, M. (2019). Pakistan 2019: The challenges of the first PTI government. *Asia Maior*, 30. <https://www.asiamaior.org/?p=1113>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE.
- Dmitrieva, E. (2021). Imran Khan as the Key to Success of Pakistan Tehreek-E-Insaf. *Russia and the Moslem World*, 2(312), 81-88.

-
- Ellis-Petersen, H., & Baloch, S. M. (2024, February 11). *Protests take place across Pakistan amid election vote-rigging allegations*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2024/feb/11/protests-pakistan-election-vote-rigging-allegations-imran-khan>
- Faiz, A. (2022). We are on the same page: The curious case of Imran Khan's populism in Pakistan. In A. Dieckhoff, C. Jaffrelot, & E. Massicard (Eds.), *Contemporary populists in power* (pp. 55-74). Springer International Publishing.
- Geo News. (2022, March 30). *No-trust motion: MQM-P leadership confirms signing agreements with Opposition*. Geo News. <https://www.geo.tv/latest/408373-no-trust-motion-mqm-p-opposition>
- Ghauri, M. J., Bukhari, S. A. A., & Saleem, N. (2024). A Comparative Analysis of the Coverage of the Arrest of Imran Khan and the May 09 incidents (Pakistan) in Global Media. *Pakistan Journal of Law, Analysis and Wisdom*, 3(1), 50-67.
- Haider, S. K., & Ali, S. S. (2018). Impact of Benazir Bhutto Death on Performance of PPP and Electoral Politics of Pakistan 2008-2013. *Pakistan Vision*, 19(1), 136-163.
- Ibenskas, R., & Bolleyer, N. (2018). Forms of inter-party cooperation: Electoral coalitions and party mergers. *East European Politics and Societies*, 32(3), 451-472.
- Ibrahim, M., & Mussarat, R. (2015). Electoral politics: A case study of Pakistan (1947-1985). *Journal of Public Administration and Governance*, 5(1), 68-91. <https://doi.org/10.5296/jpag.v5i1.7083>
- Kamran, T. (2009). Early phase of electoral politics in Pakistan: 1950s. *South Asian Studies*, 24(2), 257-282.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5-28.
- Khan, M. I. (2020, November 20). *Pakistan opposition unites to take on Imran Khan*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55009241>
- Khan, S., & Verma, A. (2024). Comparison of Political Parties in India and Pakistan. *International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies*, 5(3), 221-234. <https://doi-ds.org/doilink/03.2024-44369152/IRJHIS2403026>
- Kitschelt, H. (2000). Linkages between citizens and politicians in democratic politics. *Comparative Political Studies*, 33(6-7), 845-879. <https://doi.org/10.1177/001041400003300607>
- Kristof, N. (2008, January 31). *The Dynastic Question*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2008/01/31/opinion/31kristof.html>
- Lieven, A. (2011). *Pakistan: A hard country*. Penguin UK.
- Lodhi, M. (1978). Pakistan in crisis. *Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, 16(1), 60-78. <https://doi.org/10.1080/14662047808447300>

-
- Lyon, S. M. (2019). *Political kinship in Pakistan: descent, marriage, and government stability*. Rowman & Littlefield.
- Mohiuddin, Y. N. (2006). *Pakistan: a global studies handbook*. Bloomsbury Publishing USA.
- Mufti, M. (2008). Dynastic Politics in South Asia. *South Asian Journal*, 20, 9-19.
- Muñoz, H. (2013). *Getting away with murder: Benazir Bhutto's assassination and the politics of Pakistan*. WW Norton & Company.
- Nasr, V. (2004). Military rule, Islamism and democracy in Pakistan. *The Middle East Journal*, 58(2), 195-209.
- Nishtar, S., & Khan, I. (2023). Towards the dream of universal social protection: lessons from Pakistan's Ehsaas. *The Lancet Global Health*, 11(10), e1503-e1504. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00354-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00354-6)
- Qadeer, M., Gul, S., & Asghar, M. F. (2021). Money Laundering and Power Politics in Pakistan. *Global Legal*, 27-34. [http://dx.doi.org/10.31703/glsr.2021\(VII\).04](http://dx.doi.org/10.31703/glsr.2021(VII).04)
- Radford, A. (2023, August 8). Pakistan: Imran Khan barred from politics for five years. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-66445010>
- Raza, R. (1997). *Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan, 1967-1977*. Oxford University Press.
- Raza, S. I., & Wasim, A. (2022, April 10). *Midnight vote seals Imran's fate*. Dawn. <https://www.dawn.com/news/1684296>
- Rizvi, H. A. (1998). Civil-military relations in contemporary Pakistan. *Global Politics and Strategy*, 40(2), 96-113. <https://doi.org/10.1080/00396338.1998.10107841>
- Shafqat, S. (2020). The Formation, Development, and Decay of the Pakistan Muslim League-Nawaz. In M. Mufti, S. Shafqat, & N. Siddiqui (Eds.), *Pakistan's Political Parties: Surviving between Dictatorship and Democracy* (pp. 23-40). Georgetown University Press.
- Shah, K. M., & Sareen, S. (2018, December 18). *Pakistan general elections 2018: Analysis of results and implications*. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/public/uploads/posts/pdf/20230523153009.pdf>
- Shahzad, A. (2022, March 17). *Several Pakistan MPs defect from PM Khan's party ahead of no-confidence vote*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/several-pakistan-mps-defect-pm-khans-party-ahead-no-confidence-vote-2022-03-17/>
- Sheikh, S. (2018). The promise of 'Naya Pakistan' and the rise of Pakistan Tehreek e-Insaf. *Indian Journal of Politics and International Relations (Kottayam)*, 11, 108-47.
- Shoukat, A., & Gomez, E. T. (2020). Business groups, political connections, and regime change in Pakistan. *Asian Survey*, 60(5), 952-977.

-
- Syed, A. H. (1998). Pakistan in 1997: Nawaz Sharif's Second Chance to Govern. *Asian Survey*, 38(2), 116-125.
- Syed, M. G. S., & Rahman, A. U. (2024). Alliance Politics in Pakistan: A Case Study of Pakistan Democratic Movement (2020-2023). *The Dialogue*, 19(4), 67-89.
- The Economic Times. (2022, April 10). *A timeline of how Imran Khan ousted in no-confidence vote.* The Economic Times. <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/a-timeline-of-how-imran-khan-ousted-in-no-confidence-vote/articleshow/90755603.cms>
- The Express Tribune. (2023, December 10). *Arrests, abductions of PTI candidates amid poll preps.* The Express Tribune. <https://tribune.com.pk/story/2451344/arrests-abductions-of-pti-candidates-amid-poll-prep>
- The Times of India. (2022, March 30). *No-confidence motion: Blow for Imran Khan as MQM-P strikes deal with opposition.* The Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/no-confidence-motion-blow-for-imran-khan-as-mqm-p-strikes-deal-with-opposition/articleshow/90531007.cms>
- Ullah, K. (2020). The Sharif dynasty: Industrial capital and political power in Punjab. *Contemporary South Asia*, 29(4), 512-530.
- Zafar, M. N., Arshad, F., & Ali, M. (2023). Maulana Fazal-ur-Rehman as An Alliance Maker: A Case Study of Pakistan Democratic Movement. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(2), 986-990. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1102.0410>